

## Kolaborasi Antar Instansi Bappeda Litbang Dengan Sekretariat Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Suryaningsih<sup>1</sup> Rahmawati Rita<sup>2</sup> Tri Ramdhani Faisal<sup>3</sup> Wahyudin Cecep<sup>4</sup> Virly

Aprilliyani Neng<sup>5</sup> Purnamasari Irma<sup>6</sup> Subagdja Oetje<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Suryaningsih, [suryaningsihputri594@gmail.com](mailto:suryaningsihputri594@gmail.com)

---

---

### ABSTRAK

melalui proses kolaborasi Antar Bappeda Litbang dengan Sekretariat Daerah akan meningkatkan Akuntabilitas Instansi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Instansi yang akan merencanakan untuk kemajuan wilayah di daerah kabupaten Bogor. Adapula, penelitian ini menghasilkan proses kolaborasi yang cukup terjalin dengan baik, namun ada beberapa kendala seperti miskomunikasi antar instansi yang menjadikan sedikit hambatan dalam proses kolaborasi. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor terus berusaha mengoptimalisasikan proses kolaborasi ini agar keinginan untuk memajukan suatu wilayah sesuai dengan yang diharapkan.

**Kata Kunci:** Kolaborasi, Instansi, Akuntabilitas

### PENDAHULUAN

Pada tahun 1999, dimana sejak dimulainya penerapan kebijakan mengenai otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu bersaing dalam meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan daerah, karena pemerintah daerah harus bertransformasi dari sekadar pelaksana kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pusat menjadi entitas yang mandiri dan mampu merumuskan strategi kebijakan sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kolaborasi adalah suatu aktivitas kerja sama yang melibatkan peran aktif untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Di pemerintahan daerah Kabupaten Bogor, kolaborasi antar dua instansi telah menunjukkan hasil yang sangat baik dalam memperkuat kekompakan.

Akuntabilitas sering dikaitkan dengan berbagai aspek, termasuk dalam kolaborasi. Kesepakatan yang dibuat dalam kerja sama harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, memahami akuntabilitas dalam kerjasama sangat penting dan diperlukan.

Instansi berperan sebagai institusi yang meningkatkan kolaborasi atau kerja sama dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Instansi tersebut menjadi faktor utama dalam peningkatan akuntabilitas. Dalam proses kerja sama ini, kita dapat melihat sejauh mana akuntabilitas yang dibangun oleh instansi yang terlibat.

Kolaborasi merupakan kegiatan kerja sama yang melibatkan peran aktif untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan. Di pemerintahan daerah Kabupaten Bogor, kolaborasi antara dua instansi telah menunjukkan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan kekompakan.

Akuntabilitas sering dikaitkan dengan berbagai aspek, termasuk dalam kerja sama. Kesepakatan yang dibuat dalam kerja sama harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemahaman akuntabilitas dalam kerja sama sangat penting dan diperlukan.

Instansi berfungsi sebagai institusi yang meningkatkan kolaborasi atau kerja sama dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Instansi tersebut menjadi faktor utama dalam peningkatan akuntabilitas. Dalam proses kerja sama ini, kita dapat melihat sejauh mana akuntabilitas yang dibangun oleh instansi yang terlibat

Hendarman, Paradhita Zulfa Nadia, Abdul Rachman Pambudi. 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana NDP dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam perencanaan program pendidikan di daerah. Penelitian ini berlangsung dengan penggunaan metode yaitu studi literatur dan analisis data sekunder. Responden diperoleh melalui survei dan testimoni dari diskusi kelompok terpumpun (DKT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPD

dapat digunakan sebagai instrumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendidikan di daerah

Tri Aji Pefridyono, Jeremias T.Keban. 2017. Maksud dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk melakukan proses yang meliputi mencari, menemukan, meneliti, hingga mencatat data serta informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi dalam kerjasama antar daerah SAMPAN. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan kualitatif deduktif, yaitu proses pengolahan data dan informasi yang didapatkan atas hasil temu duga bersama pihak-pihak pemangku kepentingan di wilayah daerah SAMPAN. Responden adalah pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Penelitian ini berhasil mengungkapkan apa saja faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja SAMPAN. Faktor tersebut meliputi perubahan regulasi yang menyangkut mekanisme pendanaan, interdependensi antar anggota, serta keinginan politik oleh badan legislatif yang memiliki andil di dalam perannya yaitu memutuskan suatu kebijakan di suatu daerah.

Roy G.A. Massie (2016) bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai bagaimana integritas pelaksanaan program di bidang kesehatan dari institusi publik dan sektor swasta terkait di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan observasional dengan desain potong lintang. Responden yang terlibat termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, pemegang program dari Komite Penanggulangan AIDS Provinsi, Rumah Sakit Provinsi, Puskesmas, LSM, dan klinik swasta, yang diwawancarai secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan mengidentifikasi bahwa kebutuhan terkait Sumber Daya Manusia untuk pengelola HIV / AIDS masih dikatakan minim dan belum tersedia, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kualitas dan petugas yang tersedia.

## **METODE PENELITIAN**

Teori yang digunakan oleh peneliti sendiri adalah teori proses kolaborasi dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), karena teori ini menawarkan pandangan yang menyeluruh dan relevan sehingga membantu dalam memberikan jawaban terhadap persoalan yang ada. Teori proses kolaborasi, atau Collaborative Governance Regime (CGR), menggambarkan dengan sangat terperinci bagaimana proses kolaborasi berlangsung secara dinamis dan berulang, sehingga menciptakan suatu sikap atau perilaku serta dampak-dampak yang bersifat fana sebelum mencapai dampak utama, serta beradaptasi mengenai dampak-dampak tersebut.

Proses kolaborasi yang dibahas berada dalam kerangka CGR, yang melibatkan berbagai komponen seperti dinamika kolaborasi, serangkaian tindakan kolaborasi, serta adaptasi terhadap dampak sementara dari proses kolaborasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi agar terjalinnya kerjasama sesuai yang diinginkan sebagaimana mestinya, perlu di dasari dengan beberapa kesepakatan bersama. Kesepakatan itu dibuat sesuai dengan target yang akan di capai. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, terkhususnya bagian organisasi sedang melaksanakan kolaborasi dengan instansi Bappeda Litbang dengan beberapa kepentingan yang ingin di capai. Dalam proses kolaborasi tersebut ke dua instansi ini telah membuat perjanjian bersama.

### **Dinamika Kolaborasi**

Sekretariat Daerah adalah salah satu Instansi yang memiliki fungsi mengkoordinasikan seluruh unit dalam segi perencanaan, segala aktivitas perangkat daerah, pelaporan dan evaluasi perangkat daerah yang ada di wilayahnya. Selain itu, Bappeda Litbang memiliki peran dan fungsi dalam hal perencanaan. Dalam proses kolaborasi ini Bappeda Litbang membuat suatu konsep perencanaan yang akan di usungkan kepada Sekretariat Daerah untuk memajukan wilayah itu sendiri.

Salah satu bentuk yang sudah membawa hasil dalam proses kolaborasi ini adalah pembuatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-Sakip) atau yang saat ini selalu di gunakan oleh perangkat daerah. E-Sakip adalah sebuah aplikasi yang fungsinya mencakup tentang akuntabilitas kinerja. Dalam proses kolaborasi antar instansi Inspektorat Sekretariat Daerah berperan penting di dalamnya dalam melakukan pengawasan perangkat daerah agar target-target yang sudah di rencanakan terealisasi.

### **Tindakan-tindakan Kolaborasi**

Setiap perangkat daerah memiliki kewenangan yang berbeda-beda didalamnya, lalu dalam menanggapi hal kontribusi perangkat daerah tersebut dengan unit tersebut telah menjalankan kewenangan yang sudah ditetapkan. Dalam proses kolaborasi ini yang memiliki peran penting atau tanggung jawab secara penuh adalah Kepala Sekretariat Daerah selaku pemimpin tertinggi dalam proses kolaborasi perangkat daerah. Dengan proses kolaborasi ini tentunya memiliki perubahan-perubahan didalamnya, salah satu perubahan yang di dapat dalam proses kolaborasi ini adalah membuat sebuah sistem informasi terintegrasi yang memudahkan akses-akses informasi, memantau dan memonitoring dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja lebih mudah.

### **Dampak Proses Kolaborasi**

Beberapa dampak yang dialami dalam proses kolaborasi ini adalah memudahkan akses informasi yang berkaitan dengan perangkat daerah menjadi satu acuan dalam sebuah aplikasi yang sudah dibuat. Hingga pada akhirnya lebih mudah serta kondusif dalam mengajses informasi tersebut. Namun beberapa kendala dalam proses kolaborasi ini diantaranya, miskomunikasi antar perangkat daerah yang menyebabkan kurang produktifnya mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan peraturan yang sering kali berubah-ubah dari pusat menyebabkan kurang kondusif dalam menjalankan tugas oleh unit perangkat daerah tersebut.

Dalam proses kolaborasi ini banyak perubahan-perubahan yang telah di alami baik itu bagi Sekretariat Daerah maupun Bappeda Litbang. Namun di balik

banyaknya perubahan yang sudah di alami dan dirasakan banyak pula indikator yang termasuk ke dalam faktor penghambat dalam proses kolaborasi ini. Hal yang paling utama menjadi aspek penghambat dalam proses kolaborasi ini adalah kurangnya koordinasi dari pimpinan yang paling tertinggi untuk mengkoordinir keberlangsungannya proses kolaborasi, hingga pada akhirnya membuat miskomunikasi antar instansi. Namun, itu semua bukan menjadi acuan tidak terlaksananya proses kolaborasi ini.

## **KESIMPULAN**

Kolaborasi antara Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan Bappeda Litbang sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini didasarkan pada kesepakatan yang disusun sesuai target yang ingin dicapai. Dalam kerjasama ini, Bappeda Litbang mengajukan konsep perencanaan kepada Sekretariat Daerah untuk memajukan wilayah. Salah satu hasil kolaborasi ini adalah pembuatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-Sakip), yang berdampak terhadap kemudahan proses monitoring serta evaluasi kinerja.

Sekretariat Daerah berperan dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi aktivitas perangkat daerah, sementara Bappeda Litbang fokus pada perencanaan wilayah. Inspektorat Sekretariat Daerah juga berperan penting dalam mengawasi agar target dapat tercapai.

Kolaborasi ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Daerah dan telah membawa perubahan seperti sistem informasi terintegrasi yang memudahkan akses informasi. Namun, terdapat kendala seperti miskomunikasi antar perangkat daerah dan perubahan peraturan dari pusat yang menghambat pelaksanaan tugas. Faktor penghambat utama adalah kurangnya koordinasi dari pimpinan tertinggi, yang menyebabkan miskomunikasi. Meskipun demikian, kolaborasi ini tetap berlangsung dan menghasilkan perubahan positif bagi kedua instansi.

Hasil akhir dari penelitian di lapangan ini dapat menghasilkan kesimpulan bahwasannya proses kolaborasi antar instansi dalam pengembangan perangkat

daerah kabupaten Bogor dapat dikatakan telah mencukupi standarisasi kolaborasi Krik Emerson. Proses kolaborasi ini ditandai dengan dimulainya penggerakan prinsip bersama.

## REFERENSI

Pefridiyono, T. A., & Keban, J. T. (2017). *Factors Affecting the Stagnation of SAMPAN (Sapta Mitra Pantura) Interregional Cooperation*. *Journal of Regional Development Studies*, 12(3), 59-75.

Gartika, D. (2017). *Strategi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 95-110.

Massie, R. G. A. (2016). *Assesmen Integritas dalam Program Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS di Kota Manado*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 145-160.

Aqzozaaq, D. L. C. (2020). *Collaborative Governance: Studi tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 225-240.

Rozikin, M., Wa Hesty, & Sulikah. (2021). *Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah*. *Jurnal Inovasi Administrasi Publik*, 14(1), 33-48.

Atidira, R., & Priyono, A. (2019). *Eksplorasi Intellectual Capital Pemerintah Kota Semarang*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 100-115.

Prasojo, E., Suryanto, A., & Santoso, R. (2021). *Kebijakan Berkualitas untuk Indonesia Maju*. Seminar Nasional AAKi (Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia), Jakarta, Indonesia.

Sarwoko, E. (2015). *Dampak Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45-60.